

Proxy Politik dalam Keterpilihan Erna Rasyid Sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare

Ahmad Kamal Dahlan ^{1,*}; Ariana Yunus ² ; Sakinah Nadir ³

^{1,2,3}. Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; ahmadkamaldahlan97@gmail.com

*Correspondence : ahmadkamaldahlan97@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini menjelaskan pengaruh Taufan Pawe dalam keterlibatannya dalam proses pemilihan ketua DPD II Partai Golkar kota parepare. Dimana terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe disebabkan oleh adanya hubungan antara ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan yaitu Taufan Pawe yang juga merupakan suami dari Erna Rasyid Taufan Pawe. Kajian ini membatasi pembahasan hanya pada konteks bagaimana Taufan Pawe menggunakan Erna Rasyid sebagai Proxy Politik . Dan secara singkat akan dijelaskan perbedaan mendasar dari Proxies Political dengan konsep lain yang hampir serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan pengaruh Taufan Pawe dalam pemilihan ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam. Data wawancara yang diperoleh dari informan kemudian diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan menggunakan metode interpretatif. Hasil penelitian ini menjelaskan. Apa yang dilakukan Taufan Pawe dalam Keterlibatannya dalam Kemenangan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai Ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare peneliti simpulkan sebagai Proxies Politik. Terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare merupakan bentuk besarnya pengaruh Taufan Pawe sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam mempengaruhi jalannya proses seleksi.

Kata kunci

Partai Politik, Proxy Politik, Simbol

ABSTRACT

This research explains the influence of Taufan Pawe in his involvement in the election process of the chairman of DPD II Golkar Party of Parepare city. Where the election of Erna Rasyid Taufan Pawe was caused by the relationship factor between the chairman of DPD of South Sulawesi Golkar Party, Taufan Pawe who is also the husband of Erna Rasyid Taufan Pawe. This research limits the discussion only to the context of how Taufan Pawe utilizes Erna Rasyid Taufan Pawe as a Political Proxy. And will briefly explain the fundamental differences between Proxy Politics and other similar concepts. This research uses a qualitative approach to explain Taufan Pawe's influence in the election of the chairman of DPD II Golkar Party of Parepare city. This research uses interview techniques in data collection. The interview data obtained from the informants were then interpreted according to the research needs using the interpretative method. The results of this study explain. What Taufan Pawe did in his involvement in Erna Rasyid Taufan Pawe's victory as chairman of DPD II Golkar Party of Parepare city, the researcher concluded as Political Proxy. The election of Erna Rasyid Taufan Pawe as Chairman of DPD II Golkar Party of Parepare City is a form of Taufan Pawe's influence as Chairman of DPD I Golkar Party of South Sulawesi in influencing the course of the election process in the internal Golkar Party of Parepare City.

Keywords

Political Party, Political Proxy, Symbol

Pendahuluan

Penelitian ini menjelaskan tentang terpilihnya Erna Taufan Pawe dalam pemilihan ketua DPD Partai Golkar Parepare. Dimana ada indikasi terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe disebabkan adanya hubungan antara ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan yaitu Taufan Pawe yang juga merupakan suami dari Erna Rasyid Taufan Pawe. Fenomena ini dalam literatur politik, khususnya kajian politik di Indonesia, dipandang sebagai fenomena politik kekerabatan atau politik dinasti. Sementara itu, menurut peneliti fenomena terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai ketua DPD II Partai Golkar di kota Parepare lebih mengarah pada fenomena *Proxy* politik. Kajian tentang politik *proxy* masih sangat minim, khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar peneliti mempelajari distribusi kekuasaan yang melibatkan keluarga pada tataran politik kekerabatan atau politik dinasti.

Proxy adalah peran rahasia di mana satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh (Loveman, 2002). Dengan kata lain, politik licik berarti bahwa perang tampaknya tidak menggunakan cara-cara halus untuk mengalahkan lawan menggunakan pihak ketiga. Hal inilah yang menjadi penyebab fenomena terpilihnya Andi Ema Rasyid Taufan Pawe hingga pemilihan ketua DPD Partai Golkar Parepare. Dimana Andi Taufan Pawe menggunakan istrinya untuk menduduki jabatan ketua DPD Partai Golkar Parepare. Posisi Erna Rasyid Taufan Pawe dijadikan *proxy* atau simbol representasi (Thrane, 1988) kekuasaan politik Taufan Pawe di lingkungan Partai Golkar di kota Parepare.

Proses pemilihan ketua DPD II Partai Golkar di Kota Parepare diwarnai dinamika pelaksanaannya karena pada Musyawarah Daerah (Musda) satu-satunya penantang Erna Rasyid Taufan Pawe yaitu Taqjuddin Djabbar memutuskan mundur sebagai calon ketua di tengah proses Musda Partai Golkar di Parepare. Erna Rasyid Taufan Pawe yang hanya kader biasa di organisasi Partai Golkar Parepare dan tidak memiliki rekam jejak atau jabatan politik baik di daerah maupun di provinsi baik di partai Golkar sendiri maupun di pemerintahan (Ansyari et al., 2019). Padahal dalam pemilihan itu banyak kader yang dianggap mampu dan lebih berpengalaman untuk menduduki jabatan ketua DPD II Partai Golkar Parepare.

Di lingkungan Partai Golkar di Kota Parepare masih ada kader yang dinilai lebih cocok menduduki jabatan tersebut, seperti Taqjuddin Djabbar, S.Sos yang merupakan kader lama dan mantan calon walikota Parepare pada Pilkada 2013 yang juga mantan ketua PMI kota Parepare yang kini menjabat sebagai ketua IKA Unhas wilayah Parepare, ketua DPRD Kota Parepare tahun 2019 -2024 periode yang saat itu menjabat, Alhm. Andi Nurhatina Tipu yang sebelum pensiun sebagai PNS menjabat sebagai Camat Bacukiki merupakan mantan Ketua DPRD Kota Parepare periode 2014-2019 yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Parepare untuk DPRD Kota Parepare. periode 2019-2024.

Posisi Taufan Pawe sebagai Wali Kota Parepare dan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan memiliki pengaruh besar di Partai Golkar. Dianggap sebagai faktor penyebab terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai ketua DPD II Partai Golkar Parepare, hal ini diperkuat dengan mundurnya Taqjuddin Djabbar sebagai calon ketua yang diprediksi banyak pihak akan terpilih. Banyak yang menilai mundurnya Taqjuddin Djabbar dari kontestasi pemilihan ketua DPD II Partai Golkar di Parepare juga disebabkan oleh lobi politik yang terjadi antara partai Erna Rasyid Taufan Pawe.

Erna Rasyid Taufan Pawe juga memiliki aset lain yang mendukung elektabilitasnya dalam memperoleh jabatan sebagai ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare, Erna Rasyid Taufan Pawe juga dikenal banyak melakukan kegiatan dakwah kepada masyarakat Parepare. Selain modal sebagai da'i, Erna Rasyid Taufan Pawe juga memiliki modal keluarga seperti yang telah dijelaskan di atas. Erna Rasyid Taufan Pawe adalah istri Walikota Parepare dan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan. Fenomena ini memperkuat fakta bahwa sistem kekuasaan yang diturunkan kepada keluarga atau kerabat tidak dapat diartikan sebagai praktik politik kekerabatan atau dinasti politik belaka

Dalam konteks ini, *Proxy* politik berbeda dengan politik kekerabatan atau politik dinasti. Politik kekerabatan hadir seiring dengan praktik politik liberalisasi dan desentralisasi politik (Rahmatunnisa, 2021). Politik kekerabatan merupakan konsep lama dalam kajian ilmu politik. Secara sederhana, politik kekerabatan dimaknai mirip dengan nepotisme. Mengapa demikian? Karena politik kekerabatan mempraktekkan pembagian kekuasaan di antara anggota keluarga sedarah (Syihabuddin Ahmad, 2017). Banyak kajian tentang politik kekerabatan telah dilakukan, baik di berbagai negara di dunia maupun di Indonesia. Misalnya, studi Dal Bó et al. (2009) dan Querubin (2016) dan Rossi (2016) yang membahas pengaruh masa jabatan seorang politisi terhadap kecenderungan munculnya dinasti politik (Rahmatunnisa, 2021). Temuan penting dari penelitian ini adalah terkait lamanya masa jabatan seorang politisi yang dapat memberikan keuntungan bagi kerabatnya yang bertarung dalam kontestasi pemilu, karena nama keluarga yang terkenal atau jaringan politik yang kuat dan luas. Politik kekerabatan dalam praktiknya dapat dijumpai di berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara dengan sistem demokrasi yang mapan. Misalnya Di Amerika Serikat, kita mengenal dinasti Kennedy dan George Bush.

Sebelumnya, ada juga John Adams (presiden kedua AS) yang putranya, John Quincy Adams, menjadi presiden AS keenam. Ada pula Franklin Delano Roosevelt (presiden AS ke-32) yang merupakan sepupu dari Theodore Roosevelt (presiden AS ke-26). Roosevelt sendiri dikatakan memiliki hubungan dengan 11 presiden: 5 dengan darah dan 6 dengan pernikahan (Mayntz Renate & Derlien Hans-Ulrich, 1989). Kemudian keluarga Nehru dan Gandhi di India, keluarga Bhuto di Pakistan, Trudeau di Kanada dan Allende di Cile adalah beberapa contoh dinasti politik (Jainuri, 2012). Filipina juga tak kalah spektakuler dalam praktik politik kekerabatan.

Lebih dari separuh legislator dan gubernur terpilih memiliki kerabat yang menempati posisi strategis di berbagai instansi pemerintahan. Padahal, di 40% dari 79 provinsi, gubernur dan legislator adalah kerabat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nico Harjanto (2011) berjudul Politik Kekerabatan dan Pelembagaan Partai Politik di Indonesia menjelaskan (Harjanto, 2015). Politik kekerabatan atau politik dinasti, khususnya di Indonesia, semakin menguat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya elite partai yang memberikan kekuasaan dalam partai politik kepada keluarganya untuk meneruskan pengaruh atau kepemimpinannya dalam suatu partai. Istilah politik keluarga dan politik kekerabatan adalah sama, yakni merujuk pada pelaku politik yang memiliki ikatan pertalian atau kekerabatan dengan mantan pejabat politik sebelumnya dan rentang waktu sekurang-kurangnya dua generasi. Sedangkan politik dinasti menurut Hess (1966) adalah sebuah keluarga yang paling sedikit memiliki empat anggota, dengan nama yang sama, dipilih sebagai pejabat resmi. Sedangkan menurut Yasushi Asako (2010), politik dinasti terjadi ketika salah satu anggota keluarga menempati posisi politik yang sebelumnya dipegang oleh kerabatnya .

Keterbatasan definisi berdasarkan pengertian di atas menunjukkan perbedaan dimensi waktu dan jumlah. Keluarga pejabat politik sebelumnya dalam rentang minimal dua periode kekuasaan dan terdiri dari setidaknya dua generasi disebut politik kekerabatan sedangkan politik dinasti mengacu pada empat kerabat yang sama dalam posisi resmi (Hess, 1966) atau bahkan terdiri dari empat generasi (Dal Bo, Dal Bo, dan Snyder 2007) (Pratiwi, 2018). Berbeda dengan kajian dan penelitian tersebut yang menyangkut politik kekerabatan dan politik dinasti. Terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe yang sejatinya bergerak dalam ruang non formal dan merupakan proses tarik menarik kepentingan, penulis akan menggunakan teori representasi simbolik sebagai alat analisis untuk mengungkap dinamika politik yang terjadi.

Berangkat dari penjelasan di atas. Kajian ini membatasi pembahasan hanya pada konteks Bagaimana Taufan Pawe menggunakan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai *Proxy Politik*. Dan secara singkat akan dijelaskan perbedaan mendasar dari *Proxies Political* dengan konsep lain yang hampir mirip dalam kajian ini. Seperti rancangan politik dinasti dan kekerabatan yang telah sedikit dijelaskan di awal kajian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kajian ini tidak berada dalam pembahasan politik kekerabatan dan politik dinasti. Selain menjelaskan konsep baru dalam melihat kasus ini sebagai politik *proxy*. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan dalam mengkaji peristiwa politik khususnya yang berkaitan dengan penggunaan *proxy* politik sebab kajian *proxy* politik masih menjadi hal yang baru dan masih kurang dibahas di beberapa literatur.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan pengaruh Taufan Pawe dalam pemilihan ketua DPD II Partai Golkar kota parepare. Dan lihat literatur terkait diskusi dengan mempelajari ini. Yakni, literatur menyangkut *Proxy Politik* dan kajian yang membahas kajian politik kekerabatan dan politik dinasti. Penelitian ini juga melakukan wawancara dengan para aktor yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Informannya adalah Dr. H. M Taufan Pawe, SH, MH sebagai objek utama dalam penelitian ini dan berkedudukan sebagai ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, dan Erna Rasyid Taufan Pawe yang merupakan aktor terpilih dalam pemilihan ketua umum DPD II Partai Golkar kota parepare . Analisis data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan proses verifikasi dari sumber data (informan) (Marvasti, 2004). Data wawancara yang diperoleh dari informan kemudian diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan menggunakan metode interpretatif (Denzin & Yvonna S. Lincoln, 2000).

Hasil dan Pembahasan

1. Terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe Sebagai Bentuk Pengaruh Taufan Pawe

Partai politik yang seharusnya menjadi motor penggerak demokrasi seringkali tidak melakukan proses demokrasi di dalam dirinya, seperti dalam regenerasi kepemimpinan. Dalam proses regenerasi kepemimpinan partai politik seringkali lalai dalam menjalankan proses demokrasi secara internal. Sistem kekerabatan telah tumbuh dan berkembang dalam partai politik saat ini. kuatnya kekeluargaan dan relasi para aktor elite menjadi hal yang wajar dalam praktik pemilihan calon ketua partai (Efriza, 2019).

Partai Golkar di Kota Parepare merupakan salah satu partai dengan perolehan suara terbanyak di Kota Parepare. Berdasarkan hasil penghitungan suara pada Pileg 2019 Kota Parepare. Partai Golkar meraih 5 kursi dari 3 daerah pemilihan di Kota Parepare. Hasil ini mengalami penurunan sejak Pemilu 2004 dan 2 pemilu setelah . Pada Pemilu Legislatif 2019, terdapat 4 kursi partai Golkar Kota Parepare sendiri di DPRD Kota Parepare. Padahal pada pemilu legislatif 2019 kursi yang dimiliki Partai Golkar tidak mengalami peningkatan dan perubahan yang positif. Ini menjadi acuan untuk benar-benar merekrut ketua DPD II Golkar Kota Parepare guna mengembalikan kejayaan Golkar Kota Parepare pada pemilu mendatang.

Musyawarah DPD II Partai Golkar Kota Parepare memutuskan memilih Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare. Erna Rasyid Taufan Pawe menjadi ketua DPD II Golkar Kota Parepare melalui pertimbangan dan proses politik yang panjang sebelum dibukanya Musyawarah Daerah Partai Golkar Kota Parepare. Proses politik yang terjadi dalam pemilihan ketua DPD Golkar Kota Parepare mengakibatkan Erna Rasyid Taufan Pawe terpilih secara aklamasi. Padahal pada awalnya ada calon lain yang mengambil formulir sebagai calon ketua DPD II

Partai Golkar Kota Parepare. Namun menjelang pembukaan Musda Taqjuddin Djabbar memutuskan mundur dari proses pencalonan sehingga Erna Rasyid Taufan Pawe terpilih secara aklamasi sebagai ketua DPD II Golkar Kota Parepare.

Terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare menuai banyak pertanyaan karena Erna Rasyid Taufan Pawe hanyalah kader biasa di dalam organisasi Partai Golkar Kota Parepare dan tidak memiliki rekam jejak atau jabatan politik baik di tingkat daerah maupun provinsi. Padahal pada pemilihan itu banyak kader yang lebih berpengalaman menduduki jabatan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare. Sementara itu, di DPD II Partai Golkar Kota Parepare juga terdapat kader yang dianggap lebih cocok menduduki jabatan tersebut. Dalam tubuh Partai Golkar kota Parepare masih terdapat kader yang dianggap lebih layak untuk menduduki posisi tersebut seperti Taqjuddin Djabbar. S.Sos yang merupakan kader lama dan mantan calon walikota Parepare pada Pilkada 2013 yang juga mantan ketua PMI kota Parepare yang sekarang menjabat sebagai ketua IKA Unhas wilayah Parepare, ketua DPRD Kota Parepare periode 2019-2024 yang kala itu menjabat, Alhm. Andi Nurhatina Tipu yang sebelum masa purna-nya sebagai PNS menjabat sebagai camat Bacukiki, mantan ketua DPRD Kota Parepare periode 2014-2019 yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Parepare periode 2019-2024.

Terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe selaku ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare erat kaitannya dengan keterlibatan Taufan Pawe dalam mempengaruhi jalannya proses seleksi. Posisi Taufan Pawe sebagai Wali Kota Parepare dan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan memiliki pengaruh besar di Partai Golkar. Dianggap sebagai faktor penyebab terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai ketua DPD II Partai Golkar Parepare, hal ini diperkuat dengan mundurnya Taqjuddin Djabbar sebagai calon ketua yang diprediksi banyak pihak akan terpilih. Banyak yang menilai mundurnya Taqjuddin Djabbar dari kontestasi pemilihan ketua DPD II Partai Golkar di Parepare juga disebabkan oleh lobi politik yang terjadi antara partai Erna Rasyid Taufan Pawe.

2. Keterlibatan Taufan Pawe Kemenangan Erna Rasyid Taufan Pawe Sebagai Bentuk Proxy Politik

Taufan Pawe sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare tidak bisa digolongkan sebagai fenomena politik kekerabatan atau politik dinasti. Pasalnya, posisi Erna Rasyid Taufan Pawe yang terpilih menjadi ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare. Lebih banyak dipengaruhi oleh keterlibatan Taufan Pawe selaku Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak ketiga atau dalang terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya di dalam Partai Golkar di kota Parepare. Dalam hal ini peneliti mempertimbangkan apa yang dilakukan Taufan Pawe dalam keterlibatannya dalam kemenangan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare disebut sebagai *Proxy Politik*. *Proxy politik* adalah peran rahasia di mana

satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Dengan kata lain, proxy politik berarti bahwa perang tampaknya tidak menggunakan cara-cara halus untuk mengalahkan lawan menggunakan pihak ketiga (van Dorp, 2022). Dalam konteks inilah Taufan Pawe memanfaatkan istrinya untuk menduduki jabatan Ketua DPD II Partai Golkar Parepare. Posisi Erna Rasyid Taufan Pawe dijadikan *proxy* atau simbol representasi kekuatan politik Taufan Pawe di lingkungan Partai Golkar di kota Parepare.

Pitkin menjelaskan representasi simbolik sebagai agen yang secara simbolis 'membela' prinsipal, yaitu representasi konstituen melalui perwakilan yang menyarankan atau membangkitkan perasaan. Definisi Pitkin merupakan bagian dari kerangka representasi politik empat dimensi, yaitu formalistik (aturan formal representasi), deskriptif ('posisi'). fisik), substantif ('bertindak untuk') dan simbolik. Pitkin mendefinisikan representasi simbolik sebagai dimensi itu sendiri, melengkapi tetapi tidak berasal dari representasi deskriptif. Dia melakukannya dengan menguraikan perbedaan konseptual dari berbagai dimensi representasi politik melalui hubungan agen-principal dan mengidentifikasi peran agen berdiri (secara fisik atau simbolis) dan bertindak (secara substansial) untuk prinsipal atau konstituen (Lombardo & Meier, 2019). Dari perspektif representasi simbolik, penulis kemudian melihat hubungan antara Taufan Pawe dan Erna Rasyid Taufan Pawe dalam pemilihan ketua DPD Partai Golkar Parepare. Dimana Rasyid Taufan Pawe dijadikan sebagai perwakilan simbol kekuasaan yang dimiliki oleh Taufan Pawe di partai Golkar, karena Taufan Pawe selaku ketua DPD I partai Golkar Sulawesi Selatan dan mantan ketua DPD II Partai Golkar Parepare masih berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya. kekuasaan di Partai Golkar Parepare.

Representasi simbolik khususnya dilihat oleh Pitkin sebagai proses di mana simbol, melalui asosiasi atau konvensi, mewakili sesuatu selain dirinya sendiri, seperti bendera yang mewakili nilai dan kepercayaan suatu negara (Sumskaya, 2020). Sambil menciptakan ruang untuk mendefinisikan representasi simbolik sebagai dimensi yang berdiri sendiri, Pitkin terutama mengaitkannya dengan rezim otoriter dan merendahnya karena dua alasan, mungkin kurangnya aktivitas dalam representasi simbolik dan komponen irasionalnya. Saward berpendapat bahwa representasi politik adalah tentang membuat klaim yang membangun atau menggambarkan gagasan tentang konstituensi. Fokus pada komponen yang dikonstruksikan, yang diteorikan Saward untuk representasi politik secara umum, cenderung memberikan representasi simbolik. Simbol adalah sebuah konstruksi bukan hanya karena diciptakan melalui pilihan perwakilan visual atau akustik tertentu (bendera, patung, lagu kebangsaan) dan pemilihan warna dan gambar tertentu, tetapi juga karena maknanya dibentuk, dan diasosiasikan. untuk konstituen tertentu yang karena itu disajikan dalam cara tertentu.

Simbol politik dapat mengambil bentuk yang berbeda-beda, baik itu visual seperti bendera atau patung negara, akustik seperti lagu kebangsaan, atau diskursif,

misalnya teks konstitusi Sementara penelitian telah menganalisis cara simbol seperti bendera nasional, dengan mewakili prinsipal, mewujudkan bangsa atau negara studi gender dan politik telah menempatkan fokus pada bagaimana simbol politik mencerminkan dan membentuk hubungan kekuasaan, misalnya. menghadirkan laki-laki dalam posisi yang lebih berwibawa dan diakui secara sosial daripada perempuan berpendapat bahwa simbol mencapai efek memprovokasi tanggapan tertentu terhadap prinsip yang ditimbulkan melalui pelatihan kebiasaan dan praktik sosial yang membuat orang mengasosiasikan simbol seperti bendera nasional dengan perasaan keterikatan pada bangsa, yang menjelaskan mengapa menginjak atau membakar bendera nasional dapat dikutuk secara moral atau hukum di beberapa negara

Teori representasi simbolik sebenarnya merupakan angin baru dalam melihat dinamika politik dalam pemilihan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai ketua DPD II Partai Golkar di kota Parepare. Representasi simbolik tersebut memberikan gambaran dan perspektif yang lebih luas mengenai terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai *wakil Taufan Pawe* dalam menjalankan kekuasaan dan pengaruhnya di internal Partai Golkar di kota Parepare. Selain itu, penulis juga menggunakan konsep proxy untuk mencoba memperkuat analisis dan argumentasi terkait terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe yang dijadikan sebagai *proxy* oleh Taufan Pawe dalam proses pemilihan ketua DPD II Partai Golkar, kota Parepare. Sekaligus menganalisis lebih jauh kekuatan yang dimiliki oleh seorang Taufan Pawe sebagai aktor politik sentral dalam penggunaan pengaruhnya dalam *proses Proxy politik* dalam dinamika Musyawarah Partai Golkar di kota Parepare.

Kesimpulan

Terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare merupakan bentuk besarnya pengaruh Taufan Pawe sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam mempengaruhi jalannya proses seleksi di lingkungan partai Golkar Kota Parepare. Posisi Taufan Pawe sebagai Wali Kota Parepare dan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan memiliki pengaruh besar di Partai Golkar. Menjadi salah satu faktor penyebab terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare. Apa yang dilakukan Taufan Pawe dalam Keterlibatannya dalam Kemenangan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare peneliti simpulkan sebagai *Proxies Politik*. Dimana Rasyid Taufan Pawe dijadikan sebagai perwakilan simbol kekuasaan yang dimiliki oleh Taufan Pawe di partai Golkar, karena Taufan Pawe selaku ketua DPD I partai Golkar Sulawesi Selatan dan mantan ketua DPD II Partai Golkar Parepare masih berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya. kekuasaan di Partai Golkar Parepare.

Referensi

- Ansyari, I., Adnan, M. F., & Ahmad, B. R. (2019). Peran Elit dalam Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar Sejak Era Reformasi. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 403. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.403-416>
- Denzin, K. N., & Yvonna S. Lincoln. (2000). *Handbook of Qualitative Research* (Qudsy Saifuddin Zuhri (ed.); Vol. 2). Pustaka Pelajar.
- Efriza. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik. *Politica*, 10(1), 17–38.
- Harjanto, N. (2015). Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *Analisis CSIS*, 2(2), 138–159.
- Jainuri. (2012). *Orang Kuat Partai di Aras Lokal: Blater Versus Lora Dalam Pencitraan Politik*. Citra Mentari Press.
- Lombardo, E., & Meier, P. (2019). The Significance of Symbolic Representation for Gender Issues in Politics. *NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research*, 27(4), 231–244. <https://doi.org/10.1080/08038740.2019.1660404>
- Loveman, C. (2002). Assessing the phenomenon of proxy intervention. *Conflict, Security & Development*, 2(03), 29–48. <https://doi.org/10.1080/14678800200590618>
- Marvasti, A. B. (2004). *Qualitative Research in Sociology* (D. Silverman (ed.)). Sage Publications.
- Mayntz Renate, & Derlien Hans-Ulrich. (1989). Party Patronage and Politicization of the West German Administrative Elite 1970-1987 - Toward Hybridization? *Governance: An International Journal of Policy and Administration*, 2(4), 384–404.
- Pratiwi, A. (2018). Representasi Citra Politik Harry Tanoesoedibjo (Studi Semiotika Roland Barthes Dalam Video Mars Partai Perindo). *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(2), 17. <https://doi.org/10.14421/pjk.v11i2.1426>
- Rahmatunnisa, M. (2021). Menyoal Politik Kekerabatan di Indonesia Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. *Jurnal Academia Praja*, 4.
- Sumskaya, A. (2020). Representation of Symbolic Capital of Territories by Actors of “Digital” and “Analogue” Generations in Multimodal Texts. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i2.6332>
- Syihabuddin Ahmad. (2017). *Primordalisme Politik di Indonesia Pada Pemilihan Presiden Tahun 2009 Dalam Perspektif Politik Islam*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Thrane, T. (1988). Symbolic Representation and Natural Language. *Nordic Journal of Linguistics*, 11(1–2), 151–173. <https://doi.org/10.1017/S0332586500001797>
- van Dorp, E.-J. (2022). ‘The Minister Wants it’: Self-Politicisation and Proxy Politics among Senior Civil Servants. *Public Policy and Administration*, 095207672210780. <https://doi.org/10.1177/09520767221078093>